ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penertiban pasar yang dilakukan oleh Satpol PP-WH di Pasar Inpres yang berujung pada penggusuran lapak usaha menimbulkan penolakan dari pedagang kaki lima yang tidak mau digusur, sehingga terjadi konflik kedua belah pihak. Walaupun demikian, penggusuran tetap berhasil dilakukan, namun pedagang yang lapak usahanya sudah digusur masih bertahan berjualan pada lokasinya tersebut. Permasalahan penelitian ini yaitu penyebab pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe tetap melakukan pedagangan walaupun sudah sering digusur, dan dinamika konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dan Satpol PP-WH. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori konflik Ralf Dahrendorf yang menjelaskan konflik kepentingan yang melibatkan kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan *(interest group)***.** Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe tetap melakukan pedagangan walaupun sudah sering digusur yaitu lapak berdagang sudah disewakan pedagang, lokasi yang strategis menjadi alasan pedagang berjualan, dan berdagang sebagai sumber mata pencaharian utama pedagang dalam menafkahi keluarga. Dinamika konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dan Satpol PP-WH yaitu konflik dengan Satpol PP-WH yang terjadi akibat penggusuran lapak usaha tanpa ada informasi kepada pedagang. Konflik pedagang dengan Perindagkop akibat mengingkari janji dengan tidak memberikan sewa lapak usaha pada pedagang kaki lima sesuai kesepakatan bersama, dan konflik berkembang dimana pedagang membentuk kelompok Solidaritas Pedagang Bersatu (SPB) untuk melakukan aksi demo ke Kantor Walikota Lhokseumawe untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan pedagang.

Kata Kunci: Pedagang, Satpol PP-WH, Disperindagkop, Pasar Inpres, Kota Lhokseumawe.